

## **PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ZAMAN PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG**

**Muhammad Azmi<sup>1</sup>, Bahaking Rama<sup>2</sup>, Abd. Rahim Razak<sup>3</sup>**

<sup>\*1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar| [muhammadazmi.kompak@gmail.com](mailto:muhammadazmi.kompak@gmail.com)

<sup>\*2</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar| [bahaking.rama@unismuh.ac.id](mailto:bahaking.rama@unismuh.ac.id)

<sup>\*3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar| [abdrahimrazaq@gmail.com](mailto:abdrahimrazaq@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pendidikan di Indonesia selama penjajahan Belanda dapat dikelompokkan kedalam dua periode, yaitu periode VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) dan periode pemerintah Hindia Belanda (*NederlandsIndie*). Pada periode VOC, pendidikan di Indonesia didasarkan pada prinsip bisnis yaitu berdasarkan untung rugi dalam hukum-hukum ekonomi. VOC tidak segan-segan untuk berperang bila ada yang menghalangi tujuan mereka. Ini bisa diperhatikan dari hak aktroinya yang terdapat dalam suatu pasal yang berbunyi: “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah. Hal ini menyebabkan terpecahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Di satu pihak adanya pendidikan dengan sistem pesantren dengan orientasi agama saja. Di pihak yang lain adanya pendidikan dengan sistem barat dengan orientasi sekuler yang tidak mempedulikan agama. Pecahnya sistem pendidikan di Indonesia tentu tidak menguntungkan bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Di satu sisi diperlukan pemahaman untuk mengetahui perkembangan dunia luar dengan metode dan teknologi yang dikembangkan oleh barat. Di sisi lain juga dibutuhkan pemahaman keagamaan sebagaimana telah ditanamkan sebelum VOC datang ke Indonesia. Untuk memadukan dua sistem ini kemudian muncul madrasah madrasah yang berkelas, memakai bangku dan meja yang dipelopori oleh para pembaharuan di Indonesia. Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia, bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Sejak tahun 1940 Jepang berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Raya. Dalam rencana tersebut Jepang menginginkan menjadi pusat suatu lingkungan yang berpengaruh atas daerah-daerah mansyuria, daratan Cina, kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand. Oleh karena itu rencana “kemakmuran bersama Asia Raya” dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan semboyan “Asia untuk bangsa Asia” Jepang menguasai daerah yang berpenduduk lebih dari 400 juta jiwa yang antara lain menghasilkan 50% produksi karet dan 70% timah dunia. Indonesia yang kaya sumber bahan mentah merupakan sasaran yang perlu dibina dan dimanfa’atkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perang Jepang. Sehingga Jepang menyerbu Indonesia, karena tanah air Indonesia merupakan sumber bahan-bahan mentah yang kaya raya dan tenaga manusia yang banyak tersebut sangat besar artinya demi kelangsungan perang pasifik, dan hal ini sesuai pula dengan cita-cita politik ekspansinya.

**Kata Kunci: Pendidikan Islam, Zaman, Penjajahan, Belanda, Jepang**

### **ABSTRACT**

Education in Indonesia during the Dutch colonial period can be grouped into two periods, namely the VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) period and the Dutch East Indies government period (Nederlands Indie). During the VOC period, education in Indonesia was based on business principles, namely profit and loss in economic laws. The VOC did not hesitate to go to war if someone hindered their goals. This can be seen from its acting rights contained in an article which reads: "This agency must trade in Indonesia and if necessary may wage war. And must pay attention to Christianity by establishing schools. This causes the division of education in Indonesia. On the one hand, there is education with a pesantren system with a religious orientation only. On the other hand there is education with a western system with a secular orientation that does not care about religion. The breakup of the education system in Indonesia is certainly not beneficial for the development of Indonesian society. On the one hand, understanding is needed to know the development of the outside world with the methods and technology developed by the west. On the other hand, religious understanding was also needed as it had been instilled before the VOC came to Indonesia. To combine these two systems, classy madrasas emerged, using benches and tables pioneered by reformers in Indonesia. After the Dutch were conquered by the Japanese in Indonesia on March 8, 1942, the Dutch left Indonesia. Since then, the Japanese colonization of Indonesia began. Japan emerged as a powerful country in Asia, the Japanese people had big dreams of becoming the leader of Greater East Asia. Since 1940 Japan planned to establish the common prosperity of Greater Asia. In this plan, Japan wanted to be the center of an influential sphere over the Mansyuria regions, mainland China, the Philippine Islands, Indonesia, Malaysia and Thailand. Therefore the "Greater Asia co-prosperity" plan is considered a must. With the motto "Asia for Asians" Japan controlled an area with a population of more than 400 million people which, among other things, produced 50% of the world's rubber production and 70% of the world's tin. Indonesia, which is rich in sources of raw materials, is a target that needs to be fostered and utilized as well as possible for the benefit of the Japanese war. So that Japan invaded Indonesia, because Indonesia's motherland is a rich source of raw materials and a lot of manpower is very significant for the continuation of the Pacific war, and this is also in accordance with the political aspirations of its expansion.

**Keywords: Islamic Education, Age, Colonialism, Dutch, Japanese**

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam di Indonesia dimulai ketika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 Masehi. Di abad ini, umat Islam telah membawa perubahan besar bagi para pencari ilmu yang belajar di Mekkah dan negara lain. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-19 memunculkan pemikiran modern yang dikenal dengan modernisasi. Ide ini lahir untuk meregenerasi pemikiran modern yang telah lama hilang oleh umat Islam sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kebangkitan Islam itu sendiri, banyak didirikan pesantren di Indonesia, tidak hanya mengajarkan bahasa Arab dan menguasai kitab-kitab gundul, tetapi juga bahasa lain yaitu bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya. Kemudian semenjak abad ke-20, arah

etis (*Etische Koers*) dijadikan landasan idiil dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Sejalan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, maka disusun pulalah dasar pikiran yang bertumpuh pada dua pokok pikiran (1) pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan bumi putera (2) pemberian pendidikan terendah kepada golongan bumiputera, disesuaikan dengan tenaga kerja murah. Hal ini memberi kesan adanya peluang bagi kemungkinan terjadi penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari tujuan yang termuat dalam politik etis. Para pelaksana pendidikan sendiri terkadang cenderung menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan moral itu sendiri. Dan adanya penjenisan sekolah yang meneriam murid berdasarkan latar belakang status sosialnya merupakan bagian dari penyimpangan itu.<sup>1</sup>

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk perjuangan mengusir penjajah, umat Islam tidak dapat dipisahkan. Sebagai mayoritas masyarakat di negeri ini, umat Islam tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk menata dan membangun negeri ini. Dalam bidang pendidikan, para tokoh Islam meletakkan dasar-dasar pendidikan Islam yang tidak diterima oleh pemerintah kolonial pada masa penjajahan. Pendidikan Islam tidak tercantum sebagai disiplin ilmu, terutama di sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Karena itu, para pemimpin Islam mendirikan sekolah dan menampung umat Islam untuk pendidikan agama Islam.<sup>2</sup> Sebelum Belanda datang ke Indonesia dengan memperkenalkan sekolah-sekolah dan sistem modern sebagaimana berkembang di Barat, Indonesia sudah mempunyai sistem pendidikan formal yaitu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam satu-satunya pendidikan formal yang ada pada masa itu memiliki sistem dan pengelolaan tersendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan yang dibawa oleh Belanda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 249-250

<sup>2</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 90

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Hadikarya, 1985) h. 307

## **METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah, 1) mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. 2), membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. 3), Membuat catatan penelitian. 4) Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.
2. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.
3. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

### **a) Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yang bersumber dari prosedur dan teknik pengambilan data pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini Buku Pendidikan Islam.

**b) Sumber Data Sekunder**

Sumber sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya diperoleh dari pihak lain misalnya lewat dokumentasi atau orang lain. Data sekunder ini merupakan sumber data yang berkompetensi dan relevan dengan masalah yang akan dibahas, tetapi data sekunder ini bukan menjadi sumber data yang utama dalam pembahasan ini. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari kitab maupun buku dari sumber data primer, berupa tulisan – tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai pemikiran Syaikh Umar Baraja dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

**4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu;

- a. Kepustakaan
- b. Dokumentasi

**5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini adalah content analysis atau analisis isi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendidikan Islam Pada Zaman Belanda**

S. Nasution mengklasifikasi ciri umum pendidikan Kolonial Belanda menjadi enam ciri (yaitu) : (1) *gradulisme* (2) *dualism* (3) pengawasan pusat yang ketat (4) pendidikan pegawai yang diutamakan (5) *konkordansi* (6) tidak perencanaan yang sistematis bagi pendidikan pribumi. Menurut Ki Suratman, ada tiga ciri pokok yakni (1) pendidikan bersifat heterogeny (banyak ragamnya) (2) pendidikan bersifat deskriminatif (3) pendidikan cenderung intelektualistik. Lebih jauh kihajar dewantara Ki Hajar Dewantara yang melihatnya dari kepentingan pendidikan rakyat pribumi sebagai suatu bangsa, menilai pendidikan Belanda bersifat *kolonialistik* dan *intelektualistik*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*

Pendapat di atas menggambarkan bagaimana pandangan tokoh-tokoh pribumi sebagai bangsa terjajah. Sebaliknya sebagai bangsa penjajah, pemerintah Kolonial Belanda bagaimanapun harus berupaya menanamkan kekuatan politik yang dapat mencerminkan dirinya sebagai penguasa di wilayah jajahannya. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud mereka menggunakan berbagai jalur yang memungkinkan. Dan diduga, jalur pendidikan mereka nilai sebagai jalur yang paling efektif. Sejalan dengan kepentingan politik kolonialnya itu, maka sistem pendidikan di Hindia Belanda harus disusun berdasarkan kepentingan Belanda sebagai penjajah. Paling tidak, dalam pandangan mereka sistem pendidikan harus memberi gambaran adanya unsur antara pendidikan kolonial dengan pendidikan pribumi. Selain itu adanya keterikatan antara sistem pendidikan Hindia Belanda dengan sistem pendidikan Nederland, menurut mereka perlu diperjelas dan adanya prinsip *konkordansi*<sup>5</sup> merupakan cerminan keinginan tersebut.

Menurut Deliar Nur dalam Buku *Islam dan Politik di Indonesia* dikutip oleh Ramayulis mengatakan untuk membedakan antara status mereka sebagai penjajah dengan penduduk pribumi, mereka memasukkan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan sedangkan tujuan jangka panjang dalam menjaga kemantapan politik penjajahan, mereka mengusahakan agar di sekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama. Sekolah yang netral agama menurut pandangan pemerintahan paling tidak mempunyai tujuan ganda. *Pertama*, untuk menghindari anggapan bahwa penguasa (Kristen) pemerintah tidak memihak kepentingan *Missie* dan *Zending*, atau tidak berkeinginan mengembangkan agama Kristen melalui sekolah. *Kedua*, secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dari keterikatan dengan ajaran mereka (Islam) melalui sekolah-sekolah pemerintah yang netral agama. Hubungan antara sistem pendidikan dan kepentingan politik itu, diperkirakan tetap dipedomani oleh para penguasa kolonial di Hindia Belanda selama penjajahan mereka, dan walaupun terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, barangkali hal itu disebabkan oleh pengaruh kondisi tertentu. Perubahan tersebut bukan disebabkan oleh perubahan sistem pendidikan dalam arti lepas dari keterkaitan dengan kepentingan politik.

---

<sup>5</sup>Prinsip konkordansi bertujuan (1) untuk menjaga hubungan antar sistem pendidikan di sekolah-sekolah Hindia Belanda dengan sekolah sekolah Nederland dan (2) agar sekolah sekolah di Hindia Belanda sama standanya dengan sekolah sekolah Nederland

### c) Pelaksanaan Pendidikan Kolonial Belanda

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah sekolah pemerintahan Hindia Belanda, pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan Kolonial Belanda. Tujuan, ciri ciri umum dan bentuk kelembagaan yang diterapkan di sekolah sekolah tersebut adalah merupakan realisasi dari sistem pendidikan yang mereka programkan. Adanya kaitan antara politik dan pendidikan agaknya ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolahan itu, secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut : Jenis jenis sekolah terdiri atas.<sup>6</sup>

- 1) Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa Belanda yang terdiri atas : Sekolah Rendah Eropa (*Eropeesche Lager School*) dan Sekolah Bumiputera kelas satu, terdiri atas : Sekolah Cina Belanda (*Hollandche Chinese school*) dan Sekolah Bumiputera Belanda (*Hollandche Inlandche School*)
- 2) Sekolah Rendah Berbahasa Pengantar Bahasa Daerah, yang dibagi menjadi tiga, yaitu: Sekolah Bumiputera kelas dua (*Inlandsche School Tweede Klasse*), Sekolah Desa (*Volkschool*) dan Sekolah peralihan (*Vervolschool*)
- 3) Sekolah peralihan (*Schakel School*), sebagai sekolah peralihan dari Sekolah Desa ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda terdiri dari tiga Pendidikan menengah (*Middlebaar Onderwijs*) terdiri atas: sekolah menengah umum (SMU) yaitu (a) MULO (Meer Uitgereid Lager Onderwijs dan (b) AMS (*Algemenne Middlebaar School*) dan Sekolah Tinggi Warga Negara (*Hogere Burgerschool*). Pendidikan tinggi terdiri dari tiga jurusan yaitu : Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Teknik<sup>7</sup>

Penjelasan sekolah di atas menunjukkan kenyataan akan adanya sikap deskriminatif dalam sistem pendidikan Kolonial Belanda. Hal itu terlihat pada (1) Adanya penjenisan sekolah yang dikaitkan dengan status sosial, berdasarkan keturunan. (2), masyarakat pribumi kurang diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada pendidikan rendah, jenis sekolah lebih banyak dibandingkan dengan

---

<sup>6</sup>Kareel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta : LP3S, 1986), h. 24

<sup>7</sup>Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 252

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan keadaan yang seperti itu, tampaknya memang sudah diprogramkan, sehingga kesempatan masyarakat pribumi untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah menengah dan sekolah tinggi dibatasi. Selain itu, dalam usaha untuk menghambat kesempatan belajar itu, maka pemerintah memberlakukan pula persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari beberapa segi diduga memberatkan bagi murid-murid golongan pribumi. Barangkali data lulusan murid-murid tahun 1940 dapat memperkuat keabsahan itu. Dari 21.255 sekolah dasar dengan jumlah murid 88.233 orang, ternyata yang lulus 7.790 orang, 16) yaitu sekitar 8,5% saja. Lebih jauh tindakan deskriminatif dalam bidang pendidikan juga diterapkan dengan membedakan sekolah-sekolah menjadi sekolah untuk orang Eropa, Cina dan Bumiputera, Dengan demikian, dari berbagai segi, kesempatan belajar bagi penduduk pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan.<sup>8</sup>

#### **d) Sistem Pendidikan Islam Pada Masa Belanda**

Pada masa Kolonial Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan pendidikan Bumiputera karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu (1) sistem pendidikan Hindu Islam (2) Sistem Pendidikan Surau (langar) dan Sistem Pendidikan Pesantren.

##### **a. Sistem Pendidikan Peralihan Hindu Islam**

Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam pada garis besarnya pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem keraton dan sistem pertapa

Sistem pendidikan kraton ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya sistem bertapa para murid mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Adapun murid-murid tidak terbatas pada golongan bangsawan dan kalangan keraton tetapi juga termasuk rakyat jelata.<sup>9</sup>

##### **b. Sistem Pendidikan Surau**

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 253

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 254



Sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (*Urang Siak*) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dalam proses pembelajaran murid tidak memakai meja ataupun papan tulis, yang ada hanya kitab kuning merupakan sumber utamanya dalam pembelajaran. Metode utama dalam proses pembelajaran di surau dengan memakai metode ceramah, membaca dan menghafal. Materi pembelajaran yang diberikan Syeikh kepada urang siak dilaksanakan sambil duduk di lantai dalam bentuk setengah lingkaran. Syeikh membacakan materi pembelajaran, sementara murid menyimaknya dengan mencatat beberapa catatan penting di sisi kitab yang dibahasnya atau dengan menggunakan buku khusus yang telah disiapkan oleh murid. Sistem seperti ini terkenal dengan istilah halaqoh.<sup>10</sup>

c. Sistem Pendidikan Pesantren

Metode yang digunakan adalah metode sorogan, atau layanan individual yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiyai, kemudian kiyai membacakan beberapa bagian dari kitab itu, lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Bagi santri yang telah menguasai materi lama, maka ia boleh menguasai materi baru lagi. Metode wetonan dan bandongan, atau layanan kolektif ialah metode mengajar dengan sistem ceramah. Dalam metode ini kyai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari suatu kitab dan para santri menyimak bacaan kyai sambil membuat catatan penjelasan di penggir kitabnya. Metode Musyawarah Adalah belajar dalam bentuk seminar (diskusi) untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pembelajaran-pelajaran santri ditingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang

---

<sup>10</sup>Muh Amin, *Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang* (Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 10 , No. 2, Tahun 2019 ISSN: 1978-5119

telah ditentukan kiyainya. Kiyai harus menyerahkan dan memberi bimbingan seperlunya.

11

Kurikulum Pesantren Menurut Karel A Steenbrink (1984:39) semenjak akhir abad ke-19 pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan misalnya oleh LWC Van Den Berg (1886) seorang pakar pendidikan dari Belanda. Berdasarkan wawancaranya dengan para kiyai, dia mengkomplikasi kitab kuning meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum maupun fikih ibadah, tata bahasa Arab, ushuludin, tasawuf dan tafsir. Dari hasil penelitian Van De Berg tersebut, Karel A. Steenbrink menyimpulkan antara lain kitab-kitab yang dipakai di pesantren hampir semuanya berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pada umumnya pendidikan di pesantren mengutamakan pelajaran fikih. Namun sekalipun mengutamakan pelajaran fikih mata pelajaran lainnya tidak diabaikan sama sekali. Dalam hal ini mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu alat, pembinaan iman, dan akhlak sangat diperlukan. Pengajaran bahasa Arab adalah ilmu bantu untuk pemahaman kitab-kitab agama. Pengajaran bahasa Arab tersebut terdiri dari beberapa cabang dan tingkatan sebagai dasar bagi santri untuk melakukan pengajian kitab dengan begitu, santri harus memiliki pengetahuan bahasa Arab terlebih dahulu sebelum pengajian kitab yang sebenarnya dilaksanakan. Pengajian kitab yang dimaksudkan itu adalah pengajian fikih dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Kitab-kitab fikih tersebut ditulis dalam bahasa Arab.

Tetapi setelah melihat perkembangan lebih lanjut, seperti peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah swasta sebagai institusi pendidikan di luar sistem persekolahan pemerintah, kalangan pemerintah semakin hati-hati terhadap sikap netral mereka selama ini. Masalah Islam yang menjadi sumber kekhawatiran pemerintah tersebut agaknya tidak terbatas adanya institusi pendidikannya saja. Lebih jauh dari itu, mereka memandang kemungkinan pendidikan Islam tersebut memengaruhi sekolah-sekolah swasta lainnya. Adanya latar belakang tersebut pemerintah Belanda merubah sikapnya dalam menghadapi kemungkinan buruk yang bakal timbul dari peningkatan jumlah madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sebagai tindakan pencegahan, dikeluarkan ordonansi tanggal 28 Maret 1932 Lembaran Negara no 136 dan 260 isinya berupa

---

<sup>11</sup>Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 253-258

pembatasan kebebasan mengajar bagi guru-guru sekolah swasta. Sistem ini tidak memberi keuntungan bagi perkembangan institusi pendidikan Islam. Bahkan dalam ordonansi yang dikeluarkan tahun 1932, dinyatakan bahwa semua sekolah yang tidak dibangun pemerintah atau tidak memperoleh subsidi dari pemerintah, diharuskan minta izin terlebih dahulu, sebelum sekolah itu didirikan. Dengan kebijakan ini pemerintah kolonial Belanda mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan umat Islam terlebih di Minangkabau. Hal ini karena umat Islam Minangkabau melihat adanya “sesuatu” yang akan merugikan Agama Islam jika kebijakan ini dilaksanakan. Atas reaksi yang sedemikian besar, akhirnya pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jendralnya memberi jawaban bahwa ordonansi guru di Minangkabau belum ada niat kapan untuk dilaksanakan. Lambat laun kebijakan ordonansi guru tidak jalan dan akhirnya kebijakan ini di batalkan dan hilang dari peredaran. Walaupun sebelum keputusan ini di buat sesungguhnya Belanda telah berusaha membujuk beberapa tokoh Islam Minangkabau untuk mendukung pelaksanaan ordonansi ini, namun mereka tidak berhasil.<sup>12</sup>

## **2. Pendidikan Islam Masa Jepang**

Pergantian kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan pendudukan Jepang turut mempengaruhi wajah pendidikan nusantara. Pemerintahan Jepang yang menjajah lebih pendek, sekitar 3.5 tahun, meninggalkan jejak pendidikan yang berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda yang berkuasa di Nusantara sekitar 350 tahun. Jepang yang menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942 hingga Agustus 1945, banyak menimbulkan reaksi yang bersifat konflik fisik, ekonomi, politik maupun dalam bidang pendidikan. Sejak datang pertama kali ke Nusantara, Jepang mendapatkan penyambutan yang positif dari rakyat Indonesia yang sudah ratusan tahun terkungkung oleh penjajahan Kolonial Belanda. Kedatangan Jepang membawa secercah harapan baru bagi bangsa Indonesia yang ingin lepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, bagaikan pinang dibelah dua ternyata kebijakan politik pemerintahan Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Ekspektasi yang besar rakyat Indonesia untuk memperoleh kemakmuran hanyalah angan-angan kosong yang tak dipenuhi oleh Jepang dikemudian hari. Pendudukan Jepang justru menambah

---

<sup>12</sup>Ibid, h. 274-275

kesengsaraan rakyat yang telah ratusan menderita. Jepang hanya mengeksploitasi kekayaan dan sumber daya rakyat Indonesia. Kebijakan politik dan pendidikan Jepang jauh dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat.

#### **a. Kebijakan Pendidikan Pada Masa Jepang**

Bila kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda adalah misi Kristenisasi, maka pada pendudukan Jepang terjadi peralihan drastis karena titik tumpu Jepang bukan pada agama Kristen. Misi khas dari kebijakan pendidikannya tidak lain adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia, dalam arti pengalihan budaya dari akar keIndonesiaan ke urat budaya Nippon, sebagaimana yang pernah dilakukannya pada Manchuria, Korea dan Formosa (Taiwan) sebelum Perang Dunia ke-2.<sup>13</sup> Upaya Nipponisasi tampak pada beberapa gerakan diantaranya yang telah disebutkan diatas yakni slogan “Tiga A”. Slogan tersebut tidak lain hanyalah untuk menarik simpatik bangsa Indonesia, khususnya umat Islam untuk bersama-sama Jepang memenagkan perang Asia dibawah pimpinan Dai Nippon.

Melalui trik Nipponisasi bahasa, bahasa-bahasa yang digunakan seperti bahasa Inggris, Amerika dan Belanda dilarang untuk dijadikan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Bahasa Arab yang semula digunakan juga dilarang penggunaannya. Pelarangan tersebut juga dilakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Pemerintah Nippon hanya mengijinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, dan bahasa Jepang sebagai bahasa kedua dalam komunikasi tak terkecuali dalam pendidikan. Pelarangan penggunaan bahasa-bahasa tersebut terutama terhadap bahasa Belanda yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh penjajah Belanda yang telah sekian lama menjajah Indonesia dari berbagai aspek.<sup>14</sup>

Penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek pendidikan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan bahasa Indonesia. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan yang sebelumnya tidak mengenal bahasa Indonesia menjadi lebih mengenal bahasa negerinya sendiri. Perlu dicatat bahwa pada masa Kolonial Belanda, selain menggunakan bahasa Asing, disekolah-sekolah juga ada yang menggunakan bahasa daerah dalam proses pembelajaran. Nipponisasi lain yang dilakukan Jepang ialah

---

<sup>13</sup>Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), h.112

<sup>14</sup>Ibid h.113-114

propaganda. Propaganda bagi rakyat pedesaan yang mayoritas buta huruf dan kurang terdidik dilakukan melalui hiburan, berupa: film layar lebar, drama, wayang kulit, tari, nyanyian dan radio. Sedangkan untuk masyarakat perkotaan yang umumnya sudah terbiasa baca tulis serta terdidik, maka propaganda yang diterapkan lewat media cetak, surat kabar dan sejenisnya disamping masih menggunakan kategori pertama.<sup>15</sup>

Propaganda via radio misalnya bertujuan untuk menyampaikan informasi pidato pemerintah Jepang. Menyampaikan pendidikan politik baik yang langsung disampaikan pemerintah Jepang ataupun yang melalui tokoh nasionalis terkenal seperti Ir. Soekarno dan yang lainnya. Selain itu, radio juga sebagai media belajar rakyat terhadap bahasa Jepang, mendengarkan lagu-lagu dan ceramah berbagai topik termasuk mengenai pendidikan Islam. Nipponisasi selanjutnya adalah melalui indoktrinasi. Jepang membentuk wadah pelatihan perjuangan, antara lain: *Seindojo* (Panti Latihan Militer), *Seinekurensyo* (Pusat Latihan Pemuda), *Seindean* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Pembantu Polisi), *Peta* (Pembela Tanah Air) dan juga Hizbullah yang banyak diikuti kalangan santri dan kiai. Mereka diasramakan untuk dikader dan diindoktrinasi.<sup>16</sup> Bagi Jepang, ulama merupakan alat yang paling efektif untuk menyebarkan pengaruh di masyarakat pedesaan. Secara cerdik orang-orang Jepang bersikap yang berlawanan dengan kolonial Belanda. Mereka mengakui dan berusaha untuk memanfaatkan posisi kunci kaum ulama di dalam masyarakat Indonesia. Usaha-usaha tersebut banyak dilakukan oleh Shumubu.

Shumubu mengadakan perjalanan keliling Jawa dan mengundang konferensi kiai-kiai setempat. Sesudah Gunseikan mengumumkan kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Islam pedesaan yang akan menjadikan kiai-kiai dan guru-guru agama Islam jadi pemimpin front sipil dan bertugas menjamin keamanan dan kesiagaan rakyat. Antara Juli 1943 sampai Mei 1945 diadakannya penataran para kiai selama 30 hari setiap angkatan. Didalam penataran ini para ulama diindoktrinasi dengan ide-ide dan propaganda Jepang. Setiap angkatan diikuti 60 orang ulama dari 20 karisidenan di Jawa. Syarat bagi peserta adalah memiliki pengaruh yang luas, perpengetahuan luas, berposisi sosial baik dan karakter yang tidak tercela. Dalam penataran ini para ulama diasramakan dan tidak boleh

---

<sup>15</sup>Ibid h.115-116

<sup>16</sup>Ibid h.116

berhubungan dengan public. Mereka harus hidup dalam suasana dan ideologi Jepang. Indoktrinasi tersebut dirasa yang paling efektif oleh pemerintah Jepang. Diharapkan setelah dikarantina, diberikan pendidikan selama 30 hari, faham-faham Nippon dapat tertanam dalam pemikiran ulama dan kiai. Karena mereka mempunyai pengaruh besar dikalangan masyarakat., anggapan tersebut tampaknya tidak sepenuhnya benar dan terealisasi. Banyak kiai dan ulama yang akhirnya membentuk gerakan pembebasan untuk melakukan pemberontakan pemerintahan penjajahan Jepang. Sebagai contoh adalah perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh ulama muda Tengku Abdul Jalil, guru mengaji di Cot Plieng Lok Seumawe. Usaha Jepang untuk membujuk sang ulama tidak berhasil, sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di pagi buta sewaktu rakyat sedang melaksanakan shalat Subuh. Dengan persenjataan sederhana/seadanya rakyat berusaha menahan serangan dan berhasil memukul mundur pasukan Jepang untuk kembali ke Lhokseumawe. Begitu juga dengan serangan kedua, berhasil digagalkan oleh rakyat. Baru pada serangan terakhir (ketiga) Jepang berhasil membakar masjid sementara pemimpin pemberontakan (Teuku Abdul Jalil) berhasil meloloskan diri dari kepungan musuh, namun akhirnya tertembak saat sedang shalat. Selain itu, contoh lain terjadi di pesantren Sukamanah Jawa Barat (Singaparna) di bawah pimpinan KH. Zainal Mustafa, tahun 1943. Beliau menolak dengan tegas ajaran yang berbau Jepang, khususnya kewajiban untuk melakukan Seikerei setiap pagi, yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Kewajiban Seikerei ini jelas menyinggung perasaan umat Islam Indonesia karena termasuk perbuatan syirik/menyekutukan Tuhan. Selain itu beliaupun tidak tahan melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Kedua contoh diatas membuktikan indoktrinasi yang dilakukan Jepang tidak berhasil. Bahkan semakin menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme rakyat kepada bangsa dan negara.<sup>17</sup>

#### **b. Sistem Pendidikan Islam pada Masa Jepang**

Bangsa Jepang muncul sebagai bangsa kuat di Asia. Ketika kondisi dunia saat itu terjadi perang, Jepang tak tinggal diam dan menampilkan diri ikut dalam peperangan tersebut. Jepang mendapatkan prestasinya ketika menghadapi Rusia. Jepang bercita-cita

---

<sup>17</sup>Miftahur Rohman, *Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang* (al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018), h.

besar yaitu menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Jepang akhirnya menduduki Indonesia dan menaklukkan Belanda yang telah lama menjajah. Sekolah-sekolah yang ada di zaman Belanda diganti dengan sistem Jepang. Selama Jepang menjajah Indonesia, hampir setiap hari hanya diisi dengan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dari konteks peperangan. Kegiatan yang dikatakan berhubungan dengan sekolah tersebut, antara lain:

- a) Mengumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang.
- b) Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer.
- c) Menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan.
- d) Setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran.
- e) Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas.

Memang kehadiran Jepang di Indonesia dapat menanamkan jiwa “berani” pada bangsa Indonesia. Akan tetapi semua itu dilakukan hanya untuk kepentingan Jepang. Dalam bidang sosial-politik telah disebutkan di atas, kedatangan Jepang hanya untuk menguras kekayaan Indonesia. Menindas penduduk pribumi dengan sistem kerja paksa (romusa). Pendidikan pada zaman penjajahan Jepang ialah untuk memenuhi tenaga cuma-cuma (romusha) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu pelajar-pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran dan indoktrinasi. Namun bangsa kita dapat menyadari hal itu. Dengan demikian, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin gigih dan termotifasi untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, bebas dari penindasan. Tujuan pendidikan di zaman penjajahan Jepang tidaklah banyak yang dapat diuraikan, sebab murid hanya disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian dalam pendidikan sangat sedikit. Rayuan Jepang terhadap bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa Jepang adalah “saudara tua” yang datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama di Asia Timur Raya atau yang terkenal dengan hakko ichiu sebagai landasan utama pendidikan pada zaman pendudukan Jepang. Penjajah Jepang mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarang digunakan sama sekali baik di kantor-kantor maupun di sekolah sekolah. Sedangkan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Selama masa pendudukan

Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah.

Pada masa ini nasionalisme tumbuh dengan sempurna, masyarakat pedesaan dan masyarakat kecil yang sejak awal tidak mendapatkan pendidikan barat Belanda, memiliki peluang untuk meningkatkan diri dalam kemampuan penggunaan bahasa Indonesia. Mereka bersemangat mempelajari bahasa Indonesia, yang harus mereka pahami sejak dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Disudut lain dapat kita lihat secara konkret tujuan pendidikan zaman penjajahan Jepang adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma (*romusha*) dan prajurit-prajurit untuk membantu Jepang dalam perang. Berbeda dengan Jepang, pemerintah kolonial Belanda yang menjajah Indonesia sebelum Jepang menerapkan *politik divide et empera*. Yang menciptakan situasi konflik antar golongan dan memusuhi ulama. Kebijakan tersebut berimbas pada sistem pendidikan. Terjadi diskriminasi antara golongan. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengannya mengikuti pendidikan di ELS (*Europese Lagere School*) yakni sekolah dasar selama 7 tahun.

Kemudian HBS (*Hogere Burger School*) yang sederajat SMU selama 5 tahun. Lalu sekolah tinggi yang lamanya disesuaikan dengan jurusannya, untuk jurusan hukum melanjutkan ke RHS selama 6 tahun, jurusan kedokteran ke GHS selama 5 tahun. Jadi rata-rata interval waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi golongan ini dibutuhkan waktu 17 sampai 18 tahun. Sedangkan untuk golongan bumiputera atau yang dipersamakan dengannya yakni yang menurut keturunan dan status sosial berasal dari bangsawan (*aristokrat*), pemimpin adat, ulama atau rakyat jelata mengikuti pendidikan pada jenjang dasar di HIS (*Hollands Inlansche School*) selama 3 sampai 5 tahun, lalu memasuki sekolah peralihan SLO (*setingkat SMP*) selama 3 atau 4 tahun, seterusnya ke AMS (*SMA*) selama 3 tahun. Kemudian ke perguruan tinggi. Lama waktu tempuh pendidikan bagi bumiputera lebih lama sekitar 20-21 tahun. Itu berarti 3 tahun lebih lama bila dibandingkan dengan sekolah bangsa Eropa atau yang dipersamakannya, belum termasuk diskriminasi kurikulum.

Diferensiasi pendidikan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tidak dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jepang menerapkan kebijakan penyeragaman sekolah bagi seluruh penduduk Indonesia baik dari golongan atas (*Bangsawan dan sejenisnya*)



maupun dari golongan bawah (Rakyat jelata). Mereka mempunyai kesempatan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang sama. Suatu paradigma yang cukup tajam dari politik pecah belah (*devide et empera*) diganti dengan politik integrasi. Semua ormas, baik nasionalis maupun religius yang pada era kolonial Belanda berkembang secara parsial, disatukan dalam satu wadah, misalnya Masyumi. Dimasa pendudukan Jepang banyak terjadi perubahan dalam sistem pendidikan. Karena dihapusnya sistem penggolongan, baik menurut bangsa maupun menurut status sosial. Beberapa perubahan mendasar tersebut dapat adalah sebagai berikut: 1. Jenjang Sekolah Dasar atau Sekolah Rakyat (*Kekumin Gakko*), terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa diskriminasi status sosial. Lama pendidikannya diseragamkan menjadi enam tahun. Sekolah ini ada disemua desa dan kota atau tempat yang dulunya terdapat Sekolah Dasar, Sekolah Kelas Satu, Kelas Dua atau HIS dan ELS. 2. Jenjang Sekolah Lanjutan Pertama (*Shoto Chu Gakko*) atau sekarang setingkat SMP, terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki Ijazah SR. Sedangkan Sekolah Kejuruan yang ada adalah Sekolah Pertukangan (*Kogyo Gakko*), Sekolah Pertanian (*Nogyo Gakko*) dan Sekolah Pelayaran. Lama pendidikannya 3 tahun. 3. Jenjang sekolah lanjutan umum tingkat atas (*Kota Chu Gakko*). Lama pendidikannya 3 tahun. 4. Jenjang Sekolah Tinggi.

Pada tingkat ini hampir seluruh sekolah tinggi ditutup. Kecuali yang masih ada ialah Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta, Sekolah Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi (*Sika Gakko*) di Surabaya, Sekolah Teknik Tinggi (*Kagyo Dai Dakko*) yang dibuka tahun 1944 di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, Akademi pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*) yang dibuka pada awal tahun 1945 di Jakarta sebagai ganti MOSVIA pada masa Belanda.<sup>25</sup> Walaupun disatu sisi kebijakan pendidikan oleh pemerintah Jepang ini ada aspek positifnya karena penyeragaman sekolah, namun disisi lain ternyata ada aspek kekurangannya, terutama dilihat dari jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit dari era penjajahan Belanda. Sekolah Dasar menurun jumlahnya dari 21.500 menjadi 13.500, Sekolah Lanjutan dari 850 menjadi 20, begitu pula jumlah murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% dan murid sekolah menengah merosot 90%. Jumlah guru sekolah dasar menurun 35% dan guru sekolah menengah merosot 95%.<sup>26</sup> Penyebabnya antara lain adalah beratnya tugas sebagai guru.

Materi pendidikan di era pendudukan Jepang juga mengalami pereubahan. Materi pendidikan pada masa ini adalah untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Murid-murid sering kali ditugaskan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan bengkel, asrama, mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pertahanan. Selain itu, indoktrinasi mental dan ideologi mengenai hakko Ichiu dalam rangka mencapai kemakmuran di Asia Raya bersama Jepang, memperbanyak latihan militer, pengenalan budaya Jepang, olahraga serta lagu-lagu Jepang Dengan mencermati materi pendidikan diatas, jelas bahwa Jepang pada awalnya mengalami kesulitan dalam komunikasi, karena pelarangan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lain selain bahasa Jepang dan Indonesia yang selama ini digunakan. Namun kesulitan tersebut segera diatasi Jepang dengan upaya Nipponisasi bahasa dan kederisasi tenaga Guru.<sup>18</sup>

### **c. Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Jepang**

Sikap penjajah Jepang terhadap pendidikan Islam ternyata lebih lunak, sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang.

#### 1). Madrasah

Awal pendudukan Jepang, madrasah berkembang dengan cepat terutama dari segi kuantitas. Mumpung ada angin segar yang diberikan oleh Jepang walaupun itu lebih bersifat politis belaka, namun kesempatan itu tidak disia-siakan begitu saja dan umat Islam Indonesia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, hal ini terutama dapat dilihat di Sumatera yang terkenal dengan Madrasah Awaliyahnya, yang diilhami oleh Majelis Islam Tinggi.

Hampir di seluruh pelosok pedesaan terdapat Madrasah Awal yang dikunjungi banyak anak laki-laki dan perempuan. Madrasah Awaliy tersebut diadakan sore hari lebih kurang satu setengah jam lamanya, materi yang diajarkan ialah belajar membaca al-Qur'an, ibadah, akhlak dan keimanan sebagai latihan pelajaran agama yang dilakukan di Sekolah Rakyat pagi hari.

#### 2). Pendidikan Agama di Sekolah

---

<sup>18</sup>Miftahur Rohman, *Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang* (al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018), h.

Sekolah Negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Hal ini memberi kesempatan bagi para guru agama Islam untuk mengisinya dengan ajara agama, dan di dalam pendidikan agama tersebut juga dimasukkan ajara tentang jihad melawan penjajah.

### 3). Perguruan Tinggi Islam

Pemerintah Jepang mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta.

Walaupun Jepang berusaha mendekati umat Islam dengan memberikan kebebasan dalam beragama dan dalam mengembangkan pendidikan, namun para ulama tidak akan tunduk kepada pemerintahan Jepang, apabila mereka mengganggu akidah umat. Hal ini dapat kita saksikan bagaimana masa Jepang ini perjuangan KH. Hasyim Asy'ari beserta kalangan santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang pada jam 07:00 untuk menghadap arah Tokyo menghormati kaisar Jepang yang dianggap keturunan Dewa Matahari. Akibat sikap tersebut beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang selama 8 bulan.

Oleh karena itu, meskipun dunia pendidikan secara umum terbengkalai, karena murid-muridnya sekolah setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti (romusha), bernyanyi dan sebagainya. Yang agak beruntung adalah madrasah-madrasah yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren yang bebas dari pengawasan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan dalam pondok pesantren masih dapat berjalan secara wajar.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

1. Pada masa Kolonial Belanda pendidikan Islam disebut juga dengan pendidikan Bumiputera karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada tiga macam, yaitu (1) sistem pendidikan Hindu Islam yaitu Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam pada garis besarnya pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem keraton dan sistem pertapa (2) Sistem Pendidikan Surau (langar) yaitu sistem pendidikan di surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas, murid dibedakan

---

<sup>19</sup>Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 344-345

sesuai dengan tingkatan keilmuannya, proses belajarnya tidak kaku sama muridnya (*Urang Siak*) diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki dan (3) dan Sistem Pendidikan Pesantren yaitu Metode yang digunakan adalah metode sorogan, atau layanan individual yaitu bentuk belajar mengajar dimana Kiyai hanya menghadapi seorang santri yang masih dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar

2. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang memiliki perbedaan dengan kebijakan pendidikan yang diterapkan masa kolonial Belanda. Pada era penjajahan Belanda tidak semua orang bisa sekolah, hanya golongan atas, anak pejabat atau priyai yang bisa masuk sekolah. Sedangkan rakyat jelata tidak diijinkan sekolah. Karena pada waktu itu orientasi Belanda menjajah Indonesia untuk menguras sumber daya alam Indonesia. Berbeda dengan dengan Belanda, era penjajahan Jepang, semua orang bisa menempuh pendidikan baik anak pejabat ataupun rakyat biasa. Kebijakan pendidikan ini tentu beralasan. Pada waktu itu Jepang sedang menghadapi peperangan melawan sekutu. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan jepang adalah untuk membantu mereka menghadapi sekutu

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muh *Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang* (Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 10 , No. 2, Tahun 2019 ISSN: 1978-5119
- Assegaf, Abdurrahman *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Nasution, Harun *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam : Napaktilas Perubahan Konsep Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi Saw Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- Rohman, Miftahur *Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan Jepang* (al-Hikmah : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 02 Nomor 01 Tahun 2018.
- Steenbrink, Kareel A *Pesantren, Madrasah dan Sekolah : Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* Jakarta : LP3S, 1986.
- Subhan, Arief *Lembaga Pendidikan Islam Abad Ke-20 "Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* Jakarta: Kencana, 2012.
- Yunus, Mahmud *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Hadikarya, 1985.
- Zuharini, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: BumiAksara, 2011.